

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pertumbuhan Ekonomi**

##### **1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jika perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil perorang.<sup>1</sup>

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran menjadi meningkat. Perjalanan dari waktu ke waktu, diharapkan kemampuan suatu negara dalam

---

<sup>1</sup> Imam Hardjanto, *Teori Pembangunan* (Malang: UB Press), 73.

menghasilkan barang dan jasa semakin meningkat.<sup>2</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pertumbuhan ekonomi adalah hal keadaan tumbuh dimana kenaikan produk nasional bruto disuatu negara meningkat.<sup>3</sup>

Menurut Ahmad Mahyudi, pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya penambahan atau perubahan pendapatan nasional (produksi nasional/GDP/GNP) dalam satu tahun tertentu, tanpa memperhatikan pertumbuhan penduduk dan aspek lainnya.<sup>4</sup>

Menurut pandangan ekonom klasik pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: Jumlah penduduk, jumlah stok barang dan modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan.<sup>5</sup> Menurut Kuznet pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan

---

<sup>2</sup> Basuki Pujowanto, *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis Dan Empiris*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 87.

<sup>3</sup> Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar/Meiry Qordatilah Dkk.- Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembimbingan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2011 Xvii, 576.

<sup>4</sup> Ahmad Mahyudi, *Ekonomi Pembangunan Dan Analisis Data Empiris* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), I.

<sup>5</sup> Mudjarad Kuncoro, *Indikator Ekonomi* (Yogyakarta: UPP STIM YPKN, 2004), 64.

barang-barang ekonomi bagi penduduknya, kemampuan pertumbuhan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya. Ketiga komponen pokok dari definisi ini sangat penting artinya:

- a. Kenaikan output nasional secara terus menerus merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi dan kemampuan untuk menyediakan berbagai macam barang ekonomi merupakan tanda kematangan ekonomi.
- b. Kemajuan teknologi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, namun belum merupakan syarat yang cukup. Untuk merealisasikan potensi pertumbuhan yang terkandung dalam teknologi baru.
- c. Penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi harus dilakukan. Inovasi teknologi tanpa disertai inovasi sosial

ibarat bola lampu tanpa aliran listrik. Potensi ada tetapi yang melengkapinya tidak akan berarti apa-apa.<sup>6</sup>

## **2. Teori Pertumbuhan Ekonomi**

### **a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik**

Teori pertumbuhan ekonomi klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith menjelaskan bahwa perekonomian akan mencapai keseimbangannya sendiri tanpa perlu adanya banyak campur tangan dari pemerintah dalam melakukan kegiatan-kegiatan perekonomian.<sup>7</sup>

Adam Smith berpendapat bahwa, pertumbuhan ekonomi terjadi karena adanya pertumbuhan penduduk maka akan terjadi pula pertambahan output. Sedangkan menurut David Ricardo, faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah yang mengakibatkan upah menurun dan hal ini akan menurunkan pula kesejahteraan hidup masyarakat

---

<sup>6</sup> Lincoln arsyad, ekonomi pembangunan (yogyakarta: bagian penerbitan sekolah tinggi ilmu ekonomi YKPN, 2004), 221.

<sup>7</sup> Sadono sukirno, ekonomi pembangunan; proses, masalah dan dasar kebijakan, 244.

akhirnya perekonomian akan mengalami keadaan yang statis/mandeg.<sup>8</sup>

b. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori ini merupakan pengembangan dari teori klasik sebelumnya. Pembahasan neo klasik lebih ditekankan pada akumulasi stok barang modal dan keterkaitannya dengan keputusan masyarakat untuk menabung atau melakukan investasi. menurut pertumbuhan neo klasik, pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari tiga faktor, yaitu: kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal (melalui tabungan dan investasi) serta penyempurnaan teknologi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Batari saraswati karlita, "pengaruh investasi, tenaga kerja dan ekspor terhadap PDRB sektor industri di kota semarang tahun 1993-2010" (skripsi universitas diponegoro, 2013), 28.

<sup>9</sup> Chairul nizar Dkk, "Pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi serta hubungannya terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia," fakultas ekonomi, universitas syiah kuala banda aceh, Vol.1 No. 2, (mei 2013), 1-8.

c. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori ini menekankan konsep tingkat pertumbuhan natural, selain kuantitas faktor produksi tenaga kerja diperhitungkan juga kenaikan efisiensi karena pendidikan dan latihan. Model ini dapat menentukan berapa besarnya tabungan atau investasi yang diperlukan untuk memelihara tingkat laju pertumbuhan ekonomi natural yaitu angka laju pertumbuhan ekonomi natural dikalikan dengan nisbah kapital-output.<sup>10</sup>

Harrod-Domar menyatakan supaya seluruh barang modal yang tersedia dapat digunakan sepenuhnya, permintaan agregat harus bertambah sebanyak kenaikan kapasitas barang modal yang terwujud sebagai akibat dari investasi masa lalu. Jadi untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang baik maka nilai investasi dari tahun ke tahun harus selalu naik.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Imam hardjanti, teori pembangunan (malang: UB Press), 76.

<sup>11</sup> Sadono sukirno, ekonomi pembangunan ... 256

### 3. Faktor-Faktor Penentu Penentu Pertumbuhan Ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor-faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari permasalahan kesenjangan dalam pengelolaan perekonomian, dimana para pemilik modal besar selalu mendapatkan kesempatan yang lebih luas dibandingkan dengan para pengusaha kecil dan mencegah yang serba kekurangan modal.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antar lain:

- a. **Faktor produksi**, yaitu harus mampu memanfaatkan tenaga kerja yang ada dan penggunaan bahan baku industri dalam negeri semaksimal mungkin.
- b. **Faktor investasi**, yaitu dengan membuat kebijakan investasi yang tidak rumit dan berpihak pada pasar.
- c. **Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran**, harus surplus sehingga mampu

meningkatkan cadangan devisa dan menstabilkan nilai rupiah.

- d. **Faktor kebijakan moneter dan inflasi**, yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga ini juga harus antisipatif dan dapat diterima pasar.
- e. **Faktor keuangan negara**, yaitu berupa kebijakan fiskal yang konstruktif dan mampu untuk membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>12</sup>

## **B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

### **1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu, yang didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh

---

<sup>12</sup> Sadono sukirno, ekonomi pembangunan .. 263

seluruh unit ekonomi tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.<sup>13</sup>

Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dipakai untuk mengukur suatu pertumbuhan ekonomi pada tingkat daerah. Sedangkan produk domestik bruto ini merupakan indikator yang dipakai untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara.<sup>14</sup>

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dapat didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Jadi, PDRB adalah seluruh nilai netto barang dan jasa yang dihasilkan oleh satu daerah dalam jangka waktu tertentu, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari dan dimiliki oleh penduduk daerah tersebut atau tidak.

---

<sup>13</sup> BPS, *Katalog PDRB Kabupaten Tangerang Menurut Lapangan Usaha 2011-2015*,19

<sup>14</sup> Yohanis Baibaba, *Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan PDRB Provinsi Papua*, Skripsi, (Universitas Cendrawasih: Jayapura, 2008).

PDRB terdiri dari PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung pada menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu.

## **2. Metode Perhitungan PDRB**

Pada perhitungan PDRB dapat menggunakan dua harga yaitu PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan, yang dimana PDRB harga berlaku merupakan nilai suatu barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut, dan PDRB harga konstan adalah nilai suatu barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahun acuan atau tahun dasar.

PDRB atas dasar berlaku dapat dihitung melalui dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Yang disebut metode langsung adalah metode perhitungan

dengan menggunakan data yang bersumber dari daerah. Perhitungan dengan metode langsung dapat dilakukan dengan tiga macam pendekatan:

1. Metode Langsung<sup>15</sup>

a. Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

Pendekatan ini sering disebut juga pendekatan nilai tambah. Dimana nilai tambah bruto dengan cara mengurangi nilai output yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya antara lain dari masing-masing nilai produksi bruto dari setiap sektor ekonomi, nilai tambah ini merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang diperoleh dari unit produksi sebagai input antara nilai yang ditambahkan sama dengan balas jasa factor produksi atas keikutsertaannya dalam proses produksi.

b. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Pendekatan ini merupakan nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi dihitung dengan cara

---

<sup>15</sup> Mudjarad Kuncoro, *Indikator Ekonomi* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2004), 72

menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung netto. Pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari keuntungan, surplus usaha seperti bunga netto, sewa tanah dan sebagainya.

c. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Pendekatan pengeluaran digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat untuk kepentingan konsumsi rumah tangga, pemerintah dan yayasan sosial, pembentukan modal dan ekspor. Nilai barang dan jasa hanya berasal dari produk domestik, penjumlahan seluruh komponen pengeluaran akhir ini disebut PDRB atas dasar harga pasar.

2. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung merupakan perhitungan dengan cara menggunakan data yang bersumber dari luar daerah/wilayah yang bersangkutan, seperti dengan cara

alokasi yaitu mengalokir PDB nasional menjadi PDRB Provinsi dengan menggunakan beberapa indikator produksi dana atau indikator lainnya yang cocok sebagai alokator. Perkiraan dilakukan berdasarkan alokasi dengan mengalokasikan data data tersebut ke daerah yang bersangkutan.

## **C. Pengeluaran Pemerintah**

### **1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa  $Y=C+I+G+X-M$ . Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional (dalam arti luas), sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah

dalam pembentukan agregat atau pendapatan nasional. Dengan begitu pula dapat dianalisis seberapa penting peranan pemerintah dalam perekonomian nasional.<sup>16</sup>

Pengeluaran Pemerintah disebut juga belanja pemerintah yang merupakan pembelian barang konsumsi dan barang modal. Pengeluaran konsumsi pemerintah berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), diartikan sebagai jumlah seluruh pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatannya, yang terdiri dari pembelian barang dan jasa termasuk bantuan sosial, pembayaran balas jasa atau belanja pegawai, dan penyusutan barang modal, dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa (output pasar) pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah (yang bukan dikonsumsi pemerintah).

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya peran pemerintah maupun peran pihak swasta. Selain itu pengeluaran pemerintah juga digunakan sebagai penentu

---

<sup>16</sup> Dumairry, *Perekonomian Indonesia*, 157.

jumlah pengeluaran agregat maupun penentu penentu GNP riil dalam jangka pendek. Pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa dibagi menjadi dua kelompok yaitu konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah, yang termasuk kedalam golongan konsumsi pemerintah adalah pembelian barang dan jasa yang akan dikonsumsi, seperti membayar gaji guru sekolah, membeli alat-alat tulis dan kertas, serta digunakan untuk membeli bensin untuk kendaraan pemerintah. Sedangkan yang termasuk investasi pemerintah adalah pengeluaran yang digunakan untuk membangun prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit dan irigasi.

Pemerintah tentu saja tidak hanya melakukan pengeluaran, akan tetapi juga boleh penerimaan. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah diliput dalam suatu konsep terpadu mengenai pendapatan dan belanja negara. Kebijakan-kebijaksanaan yang berkenaan dengan

penerimaan dan pengeluaran pemerintah (pendapatan dan belanja negara) disebut kebijakan fiskal.<sup>17</sup>

## 2. Teori Pengeluaran Pemerintah<sup>18</sup>

Identitas keseimbangan pendapatan nasional  $Y = C + G + X - M$  merupakan sumber legitimasi pandangan kaum keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Kenaikan (penurunan) pengeluaran pemerintah akan menaikkan (menurunkan) pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai, melainkan harus pula diperhitungkan

---

<sup>17</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 12.

<sup>18</sup> Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, 161.

siapa (lapisan masyarakat mana) yang akan terpekerjakan atau meningkat pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melemahkan kegiatan pihak swasta.

Pengamatan empiris oleh Adolph Wagner terhadap Negara-Negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang pada abad ke-19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Ekonom Jerman ini mengukurnya dari perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional.

Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Kelima penyebab dimaksud adalah tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi pemerintah. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis yang mengenai pemerintah (*organism of the state*) yang

menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakatnya.

WW Rostow dan RA Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Dalam suatu proses pembangunan, menurut Musgrave, rasio investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar, tapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan mengecil. Sementara itu Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah, dari penyediaan prasarana ekonomi, ke pengeluaran-pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Rostow dan Musgrave seperti halnya Wagner, menandai pendapatannya berdasarkan pengamatan pembangunan ekonomi di banyak negara.

### 3. Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perekonomian<sup>19</sup>

#### a. Produksi

Pengeluaran pemerintah dapat dikatakan juga sebagai faktor produksi lainnya disamping faktor-faktor produksi lainnya yang berupa alam, modal, tenaga kerja, dana manajemen, karena pemerintah dapat menunjang tersedianya faktor-faktor produksi tersebut. Misalnya, pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan potensi sumber daya manusia yang terdidik. Sumber daya manusia itu memperbesar faktor produksi yang berupa tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan oleh sektor produksi.

#### b. Distribusi

Pengeluaran negara, secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap distribusi barang dan jasa. Ambil contoh hasil dari pengeluaran anggaran untuk membiayai fasilitas kesehatan paling tidak akan mencegah

---

<sup>19</sup> Merang Kahang, Muhammad Saleh, Rachmad Budi Suharto, *Jurnal Ekonomi, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Timur*, Vol. 18, NO.2, 2016.

penyakit yang terjadi di masyarakat sehingga akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

c. Konsumsi

Secara langsung atau tidak langsung pengeluaran negara dapat mengubah atau memperbaiki pola dan tingkat konsumen masyarakat terhadap barang-barang dan jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah maupun mekanisme pasar.

d. Keseimbangan Perekonomian

Dengan kebijakan fiskalnya pemerintah dapat memperbaiki dan memelihara keseimbangan perekonomian dan meningkatkan pendapatannya melalui target peningkatan PDB. Kebijakan fiskal itu dapat berupa pelaksanaan kebijaksanaan surplus anggaran, kompensasi, investasi umum tergantung kepada situasi ekonomi yang dihadapi atau iklim ekonomi yang diinginkan.

#### **4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah,<sup>20</sup> adalah sebagai berikut:

a. Proyeksi Jumlah Pajak yang Diterima

Salah satu faktor utama yang digunakan dalam menentukan besarnya pengeluaran pemerintah adalah jumlah pajak yang diramalkan. Dalam penyusunan anggaran belanja pemerintah, maka terlebih dahulu yang harus dibuat adalah proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterima. Semakin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, maka akan semakin banyak pula pembelanjaan pemerintah yang dilakukan.

b. Tujuan-Tujuan Ekonomi yang Ingin Dicapai

Beberapa tujuan terpenting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi masalah tingkat pengangguran, menghindari tingginya tingkat inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka

---

<sup>20</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* Edisi 3, 168-169.

panjang serta pembangunan infrastruktur. Cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, sering sekali pemerintah membelanjakan uang jauh lebih besar dari pendapatan yang diterima dari pajak sehingga untuk membiayainya pemerintah terpaksa meminjam atau mencetak uang.

c. Pertimbangan Politik dan Keamanan

Kekacauan politik, perselisihan antara berbagai golongan masyarakat dan daerah sering terjadi di berbagai belahan dunia. Keadaan seperti itu akan mengakibatkan pada kenaikan pengeluaran pemerintah yang sangat besar, terutama apabila operasi militer perlu dilakukan. Ancaman kestabilan dari negara luar dapat menyebabkan kenaikan yang besar dalam pengeluaran ketentaraan dan memaksa pemerintah untuk membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari pendapatan yang diperoleh pemerintah dari pajak.

## **D. Pendapatan Asli Daerah**

### **1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pengertian pendapatan asli daerah atau yang disingkat PAD dapat merujuk pada Peraturan Menteri dalam Negeri Atau Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam peraturan tersebut, Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (pasal 1 ayat 8).<sup>21</sup>

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

---

<sup>21</sup> Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014). 169

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.<sup>22</sup>

Menurut aries djaenuri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dlam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Abdul Halim, dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah” menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dalam berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan definisi pendapatan daerah menurut IASC *frame work*

---

<sup>22</sup> Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Sektor Publik “Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah”*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 164

dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Keuangan Daerah” karangan Abdul Halim adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

“penambahan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan asset/aktiva, atau pengurangan utang/kewajiban yang mengakibatkan penambahan ekuitas dana selain penambahan ekuitas dana yang berasal dari kontribusi beserta ekuitas dana.”

Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, daan kegiatan ekspor/impor. Yang dimaksud dengan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap onjek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah.

---

<sup>23</sup> Sony Devano Dan Siti Rahayu Kurnia, *Perpajakan: Konsep, Teori Dan Isu*. (Jakarta: Kencana 2006) Hal: 33.

Contoh pungutan yang dapat menghambat kelancaran mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor antara lain retribusi izin masuk kota dan pajak/retribusi atas pengeluaran /pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah yang lain.

Dari beberapa pengertian diatas tersebut, dapat disimpulkan bahwa PAD adalah suatu penerimaan daerah yang dapat meningkatkan pendapatan yang juga bersumber dari daerah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh daerah tersebut memiliki wewenang dalam pengaturan sumber-sumber untuk mendapatkannya termasuk dalam hhal pengalokasian dana dari penerimaan daera tersebut.

Pendapatan asli daerah bersumber dari:

- 1) Pajak daerah;
- 2) Retribusi daerah; termasuk hasil pelayanan badan layanan umum (BLU) Daerah.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

4) Lain-lain PAD yang sah.<sup>24</sup>

Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan yang sah antara lain atau penerimaan dari provinsi, kabupaten/kotamadya, dan penerimaan lansesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup> Adapun lain-lain pendapatan yang sah, juga disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkam secara rinci menurut objek pendapatan antara lain: a) hasil penjualan kekayaan daerah; b) jasa giro; c) pendapatan bunga; d) penerimaan atas tuntutan gaji kerugian daerah; e) penerimaan komisi; f) penerimaan keuntungan dari selisih nilai pelaksanaan pekerjaan; g) pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan; h) pendapatan denda pajak; i) pendapatan denda retribusi; j) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; k) pendapatan dari pengembalian; l) fasilitas sosial dan umum; m) pendapatan

---

<sup>24</sup> C.S.T Cansil Dan Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Otonomi Daerah* Cet. 2, 664.

<sup>25</sup> Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta Sinar Grafika, 2009), 238.

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan; n) pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.<sup>26</sup>

## 2. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah sebagai penerimaan kas daerah merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan, mengoptimalkan kemakmuran rakyat, yaitu menumbuhkembangkan masyarakat disegala bidang keidupan. Secara umum pendapatan daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu:

### a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 bagian, yaitu:

#### a) Pajak daerah

Pajak daerah merupakan bagian pendapatan asli daerah yang terbesar. Adapun yang dimaksud dengan pajak adalah hampir tidak

---

<sup>26</sup> Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, 239.

ada bedanya dengan pengertian pajak pada umumnya, yakni iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah tanpa balas jasa yang langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.<sup>27</sup>

Seperti halnya pajak pada umumnya pajak daerah mempunyai peran ganda yaitu:

- 1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (budgetary)
  - 2) Sebagai alat pengatur (regulatory)
- b) Retribusi Daerah

Disamping pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah memiliki arti pungutan daerah sebagai bayaran atas jasa atau pemberian izin

---

<sup>27</sup> Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2002), 56

tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>28</sup>

c) Bagian Laba Usaha Daerah

Bagian laba usaha daerah meruakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan miilik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini berasal dari BPD, perusahaan daerah dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga.<sup>29</sup>

b. Dana Perimbangan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Dana Perimbangan. Dana perimbangan ialah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran dan belanja negara yang dialokasikan kepada pemerintah untuk membiayai

---

<sup>28</sup> Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah ...* 85

<sup>29</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Sekor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 65

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c. Penerimaan Lain-Lain Yang Sah

## **E. Investasi**

### **1. Pengertian Investasi**

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, sehingga seringkali digunakan secara *interchangeable*.

Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan atau

untuk mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equitment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.<sup>30</sup> Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Adakalanya penambahan modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal lama yang harus didepresiasi.<sup>31</sup>

Berdasarkan sumbernya, menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 menjelaskan bahwa investasi terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>32</sup>

a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal dalam Negeri (*domestic direct investment*) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

---

<sup>30</sup> Ana Rokhmatussa'dyah Dan Suratman, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 3.

<sup>31</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* Edisi 3, 121.

<sup>32</sup> Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, Tentang Penanaman Modal.

b. Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman modal asing (*foreign direct investment*) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara republik indonesia yang dilakukan penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Kamaruddin Ahmad mengemukakan, bahwa yang dimaksud dengan investasi ialah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Dalam definisi investasi ini, difokuskan pada penempatan uang atau dana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebagaimana yang diharapkan. Salim dan budi sutrisno menyempurnakan definisi tentang investasi, sebagai berikut:

“investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor luar negeri (asing) maupun dalam negeri (domestik) dalam

berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.”

A.Abdurrahman mengemukakan bahwa investasi memiliki dua makna: pertama, investasi berarti pembelian saham, obligasi dan benda-benda tidak bergerak, setelah diadakan analisis akan menjamin modal yang dilekatkan dan memberikan hasil memuaskan. Faktor-faktor tersebut yang membedakan investasi dan spekulasi. Kedua, dalam teori ekonomi berarti pembelian alat produksi (termasuk didalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang. Dalam kamus besar bahasa indonesia disebutkan yang dimaksud dengan investasi berarti: pertama, penanaman uang atau modal disuatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan dan kedua, jumlah uang atau modal yang ditanam.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Abdul Manan, *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2014), Hal. 94.

## **2. Teori Investasi**

### **a. Teori Klasik**

Investasi merupakan suatu pengeluaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan produksi. Jadi investasi merupakan pengeluaran yang akan menambah jumlah alat-alat produksi dalam masyarakat dimana pada akhirnya akan menambah pendapatan, sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Sehubungan dengan itu, maka sudah sewajarnya pemerintah melakukan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan masuknya investasi.

### **b. Sadono**

Investasi merupakan penanaman-penanaman modal, pengeluaran dan perusahaan untuk membeli perlengkapan-perengkapan produksi dan barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

c. Sukirno

Investasi adalah modal yang biasanya ditujukan untuk jangka panjang, penanaman modal dilakukan untuk mengembangkan usaha sendiri atau menyertai pada pihak lain. Penanamannya dapat berbentuk uang, modal tetap atau pembelian surat berharga. Investasi merupakan penghubung yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.<sup>34</sup>

### 3. Tujuan Investasi

Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi. kamarrudin ahmad mengemukakan tiga alasan sehingga banyak orang yang melakukan investasi, yaitu:

- a) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berfikir bagaimana cara meningkatkan taraf hhidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya bagaimana berusaha untuk

---

<sup>34</sup> Anak Aggung Istri Diah Paramita Dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja, *“Pengaruh Investasi Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Sekonomi Serta Kemiskinan Di Provinsi Bali,”* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia, Vol.4 No.10, (Oktober, 2015), 1995-1218.

mempertahakan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang dimasa yang akan datang.

- b) Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam memilih perusahaan atau objek lain, seorang bisa menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena digerogoti oleh inflasi.
- c) Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara didunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi dimasyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.
- d) Disamping hal tersebut, orang melakukan investasi karena dipicu oleh kebutuhan akan masa depan. Tetapi sangat disyngkan, banyak orang belum memikirkan kebutuhan akan masa depannya.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Abdul Manan, *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Hal. 97.

#### 4. Tipe-tipe Investasi

Pada saat seorang pembisnis atau erka yang memiliki kelebihan dana dan ingin berinvestasi maka ia dapat memilih dan memustuskan tipe aktiva keuangan seperti apa yang dipilihnya yaitu:

a) Direct investment<sup>36</sup>

*Direct investment* (investasi langsung) adalah mereka yang memiliki dana dapat langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung atau aktiva keuangan dari suatu perusahaan yang dapat dilakukan melalui para perantara atau berbagai cara lainnya.

b) Indirect investment<sup>37</sup>

*Indirect investment* (investasi tidak langsung) adalah mereka yang memiliki kelebihan dana dapat melakukan keputusan investasi dengan tidak terlibat secara langsung atau pembelian aktiva keuangan cukup hanya dengan memegang dalam bentuk saham atau obligasi saja.

---

<sup>36</sup> Irham Fahmi, *Pengantar Pasar Modal*, 4.

<sup>37</sup> Irham Fahmi, *Pengantar Pasar Modal*, 6.

## 5. Jenis-jenis Investasi

Pada dasarnya investasi dapat digolongkan kedalam beberapa jenis, yakni berdasarkan aset, pengaruh, ekonomi, menurut sumbernya. Dalam katan ini salim dan budi sutrisno menjelaskan, sebagai berikut:

### a) Investasi Berdasarkan Asetnya

Investasi ini merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaan. Investasi ini dibagi kepada dua jenis, yaitu:

- 1) *Real aset* yang merupakan investasi yang berwujud, seperti gedung, kendaraan dan sebagainya.
- 2) *Financial aset*, yaitu berupa dokumen (surat-surat berharga) Yng diperdagangkan dipasar uang seperti deposito, comercial paper, surat berharga pasar uang (SBPU).

b) Investasi Berdasarkan Pengaruh

Investasi modal ini merupakan investasi yang didasarkan pada faktor dan keadaan yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari bagian kegiatan investasi.<sup>38</sup>

Investasi berdasarkan pengaruh dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Investasi autonomus* (berdiri sendiri), yaitu investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif, misalnya pembelian surat-surat berharga.
- 2) *Investasi induced* (memengaruhi-menyebabkan), yakni investasi yang dipengaruhi oleh kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan, misalnya penghasilan transitori (penghasilan yang didapat selain dari bekerja), yaitu bunga tabungan.

---

<sup>38</sup> Rai Widjaya, *Penanaman Modal*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000), Hal.23

c) **Investasi Berdasarkan Sumber Pembiayaan**

Investasi model ini didasarkan kepada pembiayaan asal atau asal usul investasi itu memperoleh dana.

Investasi ini dibagi menjadi dua macam:

- 1) Investasi langsung dilaksanakan oleh pemiliknya sendiri, seperti membangun pabrik, membangun gedung selaku koontraktor, membeli total, atau mengakuisisi perusahaan.<sup>39</sup>
- 2) Investasi tidak langsung yang sering disebut dengan investasi portofolio. Investasi tidak langsung dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat-surat berharga, seperti saham, obligasi, reksadana beserta turunannya.<sup>40</sup>

**6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi<sup>41</sup>**

a) **Tingkat Keuntungan yang Akan Diperoleh**

Investor akan menanamkan modalnya pada jenis investasi yang memeberikan prospek yang baik dan

---

<sup>39</sup> Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Hal. 100

<sup>40</sup> Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Hal. 102

<sup>41</sup> Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, 46.

menguntungkan. Bila investasi yang dipilih sudah tidak menguntungkan lagi, investor akan berpindah pada jenis investasi lain yang lebih menguntungkan. Investor harus selalu mengamati kinerja perusahaan tempat ia menanamkan modalnya. Naik turunnya saham, dapat menjadi indikator apakah perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik atau tidak.

b) Tingkat Suku Bunga

Investasi merupakan fungsi dari tingkat suku bunga, dimana  $I = f(r)$ . Hubungan antara tingkat suku bunga dan investasi adalah negatif,  $\Delta I / \Delta r < 0$ . Bila suku bunga tinggi, maka jumlah investasi menurun. Begitu juga sebaliknya, jumlah investasi akan semakin banyak pada saat tingkat suku bunga relatif rendah.

c) Ramalan Kondisi Di Masa Depan

Apabila diramalkan kondisi ekonomi dimasa yang akan datang menggairahkan atau memiliki prospek yang menguntungkan, maka akan mendorong pertumbuhan investasi. pertumbuhan yang tinggi dan tingkat harga yang

stabil menjadi pemicu laju investasi. semakin baik kondisi perekonomian akan meningkatkan tingkat keuntungan para pengusaha.

d) Kemajuan Teknologi

Teknologi tinggi dan tepat guna mampu meningkatkan produktifitas sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena produktifitas yang tinggi akan meningkatkan pendapatan perusahaan, dan pada akhirnya akan dinikmati oleh pekerja. Meningkatnya pendapatan akan mendorong jumlah konsumsi. Sehingga mendorong laju investasi. bila kondisi ini tercipta secara terus menerus akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

## **F. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Pengeluaran pemerintah adalah salah satu tugas di bidang ekonomi. Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian di suatu

negara, dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Besarnya pengeluaran pemerintah akan mengakibatkan ppada peningkatan PDRB disuatu daerah, karena peningkatan agregat demand akan mendorong kenaikan investasi, penyerapan tenaga kerja dan pada akhirnya menyebabkan kenaikan produksi.<sup>42</sup>

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan uuntuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus di keluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yyang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah tersebut. Semakin besar dan banyak kegiatan

---

<sup>42</sup> Deddy Rustiono, “Analisa Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah”, 34-35.

pemerintah, semakin besar puulla pengeluaran pemerintah yang bersangkutan.

Pengeluaran pemerintah lebih mempunyai hubungan yang kuat dengan PDRB atau pertumbuhan ekonomi karena belanja pembangunan ditujukan untuk membiayai fungsi agent of development dan dari pengeluaran ini akan menghasilkan kembali produk-produk yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kemajuan tingkat perekonomian. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses pertumbuhan kegiatan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kenaikan PDRB karena adanya kenaikan output secara agregat. Mengingat bahwa kegiatan ekonomi merupakan basis PAD, proses pertumbuhan kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat akan meningkatkan PAD bagi pemerintah daerah. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat juga akan meningkatkan pendapatan mereka yyang pada gilirannya akan menaikkan konsumsi dan tuntutan atas penyediaan sarana dan prasarana publik, dan pada akhirnya akan

menaikkan PAD melalui sumber pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan lain-lain pendapatan daerah.<sup>43</sup>

### **G. Hubungan Investasi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Dalam skala mikro, Investasi didefinisikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa yang akan datang. Dengan kata lain, dalam teori ekonomi, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian.<sup>44</sup>

Sukirno berpendapat bahwa kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional serta akan meningkatkan taraf kemakmuran

---

<sup>43</sup> Harry A.P. Sitaniapessy, "*Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Dan PAD*", Politeknik Negeri Ambon.

<sup>44</sup> Sadono, Loc, Cit, Hlm. 87.

masyarakat. Peran tersebut bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yaitu:<sup>45</sup>

- a. Investasi meruakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja.
- b. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi.
- c. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Selain itu, investasi atau disebut juga penanaman modal merupakan langkah awal dari kegiatan produksi, dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi serta mencerminkan marak lesunya pembangunan.<sup>46</sup>

Investasi baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) memainkan peranan penting dalam menentukan jumlah output dan pendapatan. Dengan semakin besarnya investasi baik PMDN ataupun PMA

---

<sup>45</sup> Deddy Rustiono, "Analisa Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah", 29.

<sup>46</sup> Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1996), 132.

maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang ada disuatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan semakin meningkatnya PDRB dan diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat. Dengan demikian, investasi PMDN dan PMA memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan semakin besarnya investasi pemerintah pada barang publik maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan semakin meningkatnya PDRB.

#### **H. Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Selama ini PAD memiliki peran untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dengan memajukan perekonomian daerah. Bermula dari kemungkinan untuk mewujudkan harapan tersebut, pemerintah daerah melakukan berbagai cara dalam meningkatkan pelayanan publik, yang salah satunya dilakukan dengan melakukan belanja

untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal pun akan semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan PP No 58 Tahun 2005 tentang pengeluaran keuangan daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD. Sehingga jika pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal, maka pemerintah daerah harus menggali sebesar-besarnya.<sup>47</sup>

## **I. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan kegiatan mendata dan mengevaluasi seluruh hasil studi atau penelitian terutama pada skripsi yang lebih dulu membahas fokus yang sama dalam ringkasan tersebut, harus digali kelebihan dan kekurangan skripsi yang telah ada.

---

<sup>47</sup> Patric Rarung, “Pengaruh PAD Dan DAU Terhadap PDRB Dikota Manado”, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 16 No 3 Tahun 2016.

Tujuan dibuatnya penelitian terdahulu adalah untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian seperti membuat gambaran penelitian, mengolah data dan membuat kerangka penelitian. Adapun ringkasan penelitian terdahulu yang telah penulis baca adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Hasil
1	Mamai Maisaroh	Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Periode 2010-2015.	<p><b><u>Persamaan</u></b> dari penelitian ini ialah adanya 2 (dua) variabel X yang sama yaitu variabel Pengeluaran Pemerintah dan Investasi, dan</p> <p><b><u>Perbedaan</u></b> satu variabel dalam penelitian ini</p>	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan dan parsial investasi, pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.

			ialah dalam penelitian terdahulu menggunakan variabel Tenaga Kerja sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD).	
2	Nur Hajiyanti	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah	<b><u>Persamaan</u></b> dari penelitian ini, penulis sama sama menggunakan Keuangan Daerah sebagai objek penelitian. Sedangkan <b><u>Perbedaan</u></b>	Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja

			<p>dari penelitian ini ialah peneliti terdahulu menggunakan 4 (empat) variabel X, dan penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel X saja.</p>	<p>daerah. sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah.</p>
3	Christi Stella Manoi	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB	<p><b><u>Persamaan</u></b> dalam penelitian ini terdapat dalam variabel Y dengan menggunakan kalimat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sedangkan <b><u>Perbedaan</u></b> dalam kedua</p>	<p>80,3% PDRB sektor pertanian dipengaruhi oleh Pengeluaran Pemerintah dengan taraf nyata sebesar 30%.</p>

			<p>penelitian ini ialah terdapat dalam variabel X nya.</p> <p>Penelitian terdahulu hanya menggunakan satu variabel X saja sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel X.</p>	
--	--	--	---	--

## J. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ialah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi

hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, dan belum jawaban yang empirik.<sup>48</sup>

Hipotesis juga merupakan hasil pemikiran rasional yang dilandasi oleh teori, dalil, hukum dan sebagainya. Hipotesis juga dapat berupa pernyataan yang menggambarkan atau memprediksi hubungan-hubungan tertentu diantara dua variabel atau lebih, yang kebenaran hubungan tersebut tunduk pada peluang untuk menyimpang dari kebenaran.<sup>49</sup>

Berikut ialah Hipotesis yang digunakan dalam Penelitian ini:

1)  $H_0$  = Diduga Pengeluaran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah dan Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Banten.

$H_a$  = Diduga Pengeluaran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah dan Investasi berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Banten.

---

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: ALFABETA, 2010), 93.

<sup>49</sup> Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 44.

2)  $H_0 =$  Diduga Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Banten.

$H_a =$  Diduga Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Banten.

3)  $H_0 =$  Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Banten.

$H_a =$  Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Banten.

4)  $H_0 =$  Diduga Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Banten.

$H_a =$  Diduga Investasi berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Banten.